

1. Perkembangan inflasi daerah dan atau perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting, barang lainnya dan jasa serta risiko ke depan.

Pada Januari 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 0,85 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 105,49. Inflasi tertinggi terjadi di Kabupaten Pandeglang sebesar 1,73 persen dengan IHK sebesar 105,91. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya indeks kelompok pengeluaran, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 3,38 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 2,09 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,92 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,61 persen; kelompok transportasi sebesar 0,78 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 1,30 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,59 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,20 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,40 persen. Sementara itu dua kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 12,23 persen; kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,17 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan Januari 2025 sebesar 1,05 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,05 persen.

Pada Februari 2025 terjadi deflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 0,33 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 104,79. Deflasi terdalam terjadi di Kota Serang sebesar 1,32 persen dengan IHK sebesar 104,50. Deflasi y-on-y terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 17,71 persen. Sementara itu 10 kelompok pengeluaran lainnya mengalami inflasi, yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,54 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,44 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,47 persen; kelompok transportasi sebesar 1,06 persen; kelompok kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,60 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 2,75 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,63 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 4,13 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,76 persen. Tingkat deflasi month to month (m-to-m) Provinsi Banten bulan Februari 2025 sebesar 0,66 persen dan tingkat deflasi year to date (y-to-d) sebesar 1,71 persen.

Pada Maret 2025 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Provinsi Banten sebesar 0,70 persen dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 106,91. Tertinggi di Kabupaten Pandeglang sebesar 0,99 persen dengan IHK sebesar 107,14. Inflasi y-on-y terjadi karena naiknya harga pada 10 kelompok pengeluaran yaitu: kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 1,17 persen; kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,91 persen; kelompok perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 1,42 persen; kelompok kesehatan sebesar 2,11 persen; kelompok transportasi sebesar 1,71 persen; kelompok kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,53 persen; kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 3,90 persen; kelompok pendidikan sebesar 1,25 persen; kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 2,29 persen; dan kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 8,36 persen. Sementara itu satu kelompok mengalami deflasi, yaitu kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 7,85 persen.

Pada Triwulan I 2025, tekanan inflasi secara tahunan lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada Januari 2025, capaian inflasi tahunan Banten sebesar 0,85 (yoy) dan

menurun pada Februari menjadi -0,33% (yoy). Hal ini didorong oleh base year effect dan diskon tarif listrik yang diberikan oleh pemerintah pada bulan Januari dan Februari. Meskipun demikian, terdapat faktor pendorong inflasi yakni kenaikan harga BBM non-subsidi per 1 Februari 2025 dan harga emas yang terus meningkat. Tekanan Inflasi pada Triwulan I 2025 didorong oleh pemberlakuan kebijakan pemerintah meningkatkan tarif jalan tol pada Maret 2025, kondisi geopolitik yang masih terus berlangsung berdampak pada terkendalanya jalur distribusi yang berpotensi mendorong harga bahan baku global, penyesuaian Harga Jual Eceran (HJE) hasil tembakau yang menyebabkan peningkatan harga Sigaret Kretek Mesin (SKM), serta peningkatan permintaan bahan pokok menjelang bulan Ramadhan di bulan Februari dan Maret 2025. Berdasarkan hasil survei Pusat Informasi Harga Pangan Strategis Nasional (PIHPS) pada Minggu ketiga Februari 2025, komoditas cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan meras menjadi pendorong terjadinya deflasi yang menyebabkan penurunan harga rata-rata mingguan pada minggu ketiga Februari 2025 sebesar -1,48 % dibandingkan dengan minggu kedua Februari 2025. Penurunan harga terjadi akibat normalisasi jumlah pasokan yang panen ditengah kondisi cuaca dan curah hujan yang membaik terutama untuk komoditas bawang merah, cabai rawit dan cabai merah. Provinsi Banten Pada Maret 2025, secara tahunan tekanan harga lebih rendah dibandingkan triwulan sebelumnya. Inflasi berpotensi didorong kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau, kelompok Transportasi, dan kelompok Perumahan, Air, Listrik, dan Bahan Bakar Rumah Tangga. Berdasarkan rata-rata 3 tahun terakhir, komoditas yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi yaitu beras, daging ayam, telur ayam, bawang merah, cabai merah, dan minyak goreng. Potensi kenaikan harga pada komoditas tersebut disebabkan oleh tingginya permintaan terhadap kebutuhan pangan utama seiring berlangsungnya bulan Ramadhan dan banyaknya hajatan yang diadakan masyarakat. Komoditas bensin kembali berpotensi menyumbang inflasi seiring dengan adanya kenaikan harga bensin non-subsidi pada Januari dan Februari 2025. Adapun komoditas emas perhiasan kembali akan mendorong inflasi seiring dengan peningkatan harga emas dunia.

Upside Risk Pada Triwulan I 2025, terdapat beberapa faktor yang berpotensi menjadi pendorong inflasi, antara lain

Ketegangan politik antara Israel dan Iran yang berlangsung berimbas pada harga minyak mentah dan akan berdampak pada harga BBM dalam Negeri. Dalam perhitungan pemerintah, untuk skenario premium risk kenaikan harga minyak dalam rentang US\$5 per barel - US\$10 per barel. Kajian dari Kementerian ESDM menyampaikan setiap kenaikan US\$5 per barel akan menambah subsidi BBM sebesar Rp 0,19 T dan kenaikan tersebut akan membebani anggaran negara.

Ketegangan di wilayah Timur Tengah antara Iran dan Israel berdampak pada komoditas gandum dan kedelai. Hal ini disebabkan karena potensi jalur distribusi yang lebih panjang dan berdampak pada peningkatan biaya distribusi, dimana gandum dipasok dari negara wilayah Eropa Timur dan Kedelai dari Amerika bagian Timur. Kenaikan harga pada bahan baku berpotensi mendorong peningkatan harga pada hasil produksinya.

Tantangan Perubahan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang mengalami penambahan Kab/kota IHK baru yang berisiko tinggi maupun Kab/kota IHK lama yang mengalami peningkatan bobot inflasi.

Aturan tata kelola impor melalui Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 36/2023 disebut menghambat kebutuhan Premiks Fortifikan lantaran harus dengan Persetujuan Impor (PI) dan LS (Laporan Surveyor). Hal ini berpotensi mendorong penurunan produksi tepung

terigu >50% sehingga dapat terjadi peningkatan harga dan produk turunannya.

Potensi kenaikan tarif-tarif oleh Pemerintah (tarif air minum PAM, tarif tol, tarif parkir) berpotensi meningkatkan harga barang-barang konsumsi (consumer goods).

Peningkatan permintaan bahan baku oleh Masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.

Downside Risk Adapun beberapa faktor yang berpotensi menahan inflasi pada triwulan I 2025, antara lain:

1. Kebijakan pemerintah yang memberikan diskon tarif listrik 50% bagi pelanggan rumah tangga dengan daya dibawah 2.200 volt ampere (VA) pada bulan Januari dan Februari
 2. Perlambatan ekonomi di beberapa negara atau wilayah dapat menyebabkan penurunan permintaan konsumen secara global. Jika konsumen mengurangi pengeluaran mereka karena kekhawatiran tentang masa depan ekonomi, hal ini dapat mengurangi tekanan inflasi.
 3. Kondisi cuaca yang lebih terkendali dengan Fenomena El Nino yang sudah tidak terjadi kembali di tahun 2025.
 4. Upaya percepatan tanam yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sehingga berpotensi akan kembali mengalami panen raya, khususnya komoditas beras pada triwulan I 2025
2. Identifikasi permasalahan pengendalian inflasi di daerah.
1. Permasalahan Harga Minyak Kita Yang melonjak secara Nasional.
 2. Ketegangan di wilayah Timur Tengah antara Iran dan Israel berdampak pada komoditas gandum dan kedelai. Hal ini disebabkan karena potensi jalur distribusi yang lebih panjang dan berdampak pada peningkatan biaya distribusi, dimana gandum dipasok dari negara wilayah Eropa Timur dan Kedelai dari Amerika bagian Timur. Kenaikan harga pada bahan baku berpotensi mendorong peningkatan harga pada hasil produksinya.
 3. Tantangan Perubahan Survei Biaya Hidup Tahun 2022 yang mengalami penambahan Kab/kota IHK baru yang berisiko tinggi maupun Kab/kota IHK lama yang mengalami peningkatan bobot inflasi.
 4. Peningkatan permintaan bahan baku oleh Masyarakat menjelang HBKN Ramadhan dan Idul Fitri 2025.
3. Pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di daerah.

Provinsi Banten melakukan langkah-langkah konkrit pengendalian inflasi daerah sebagai berikut :

Keterjangkauan Harga

1. Pemantauan harga dan stabilisasi harga pangan dilakukan setiap seminggu sekali

Ketersediaan Pasokan

1. Dalam rangka menjaga stabilitas pasokan dan harga pangan strategis selama periode Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul fitri 1446 H/2025 M, telah dilaksanakan kegiatan Pengawasan Harga dan Ketersediaan Pangan Pokok pada Kamis, 17 April 2025.
2. Gubernur Banten Andra Soni dan Kapolda Banten Irjen Pol Suyudi Ario Seto melakukan

kunjungan ke Pasar Induk Rau, Gudang Bulog, dan PT Wilmar pada Rabu, 12 Maret 2025,

Kelancaran Distribusi

1. Melakukan Pendistribusian minyakita yang dilakukan oleh bulog sebagai D1, dan PT Abm sebagai D2

Komunikasi Efektif

1. Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah Melalui zoom meeting bersama Kemendagri yang diadakan setiap seminggu sekali 12 x pertemuan selama tw 1
 2. Tindaklanjut Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah diadakan setiap seminggu sekali 12 x pertemuan selama tw 1
 3. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah pada Tanggal 9 Januari 2025
 4. Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah dan TP2DD pada tanggal 7 Maret 2025
4. Evaluasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. Minyak kita masih menjadi persoalan serius dikarenakan harganya masih di melampaui harga yang sudah tertera 15.700 per liter. Stok minyakita di Provinsi Banten semakin sedikit dan harga menjadi naik itu disebabkan oleh kendala pendistribusian dari distributor ke pengecer.
 2. Penurunan harga beras disebabkan oleh beberapa faktor yaitu panen raya dan peningkatan distribusi dari daerah surplus, dan kebijakan pemerintah seperti penyaluran beras melalui bantuan sosial
 3. Provinsi banten akan melanjutkan kegiatan program tanam di sawah luhur kota serang bersama dengan Dinas Pertanian.
 4. Operasi Pasar Melakukan operasi pasar secara rutin untuk mendistribusikan komoditas dengan harga lebih terjangkau. Ini dapat membantu menstabilkan harga di pasar lokal dengan menyediakan pasokan yang cukup yang dapat dilakukan secara bersama sama antar OPD dan Dinas Indag sebagai leading sector.
 5. Mobilisasi Pasokan: Mendorong mobilisasi pasokan dari daerah yang memiliki hasil panen melimpah ke daerah yang mengalami Kerja sama antar daerah perlu ditingkatkan untuk meratakan distribusi pangan, hal ini telah di laksanakan pada program GPM (Gelar Pangan Murah).
 6. Monitoring dan Pengendalian Harga Melakukan pemantauan harga secara berkala untuk mengidentifikasi fluktuasi harga dan mengambil tindakan cepat jika terjadi lonjakan harga yang signifikan. Ini termasuk berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan bahan pokok.
5. Rekomendasi kebijakan pengendalian inflasi di daerah.
1. sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok, bahwa pengendalian inflasi tidak bisa hanya dilakukan oleh satu pihak, melainkan memerlukan Pemerintah daerah harus aktif memantau harga kebutuhan pokok, memperkuat cadangan pangan daerah, dan melakukan langkah-langkah konkret untuk menekan laju inflasi di wilayah masing-masing;
 2. kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BPS dalam pengumpulan data harga yang akurat agar distribusi serta ketersediaan bahan pangan penting seperti minyak goreng

rakyat, bawang putih, dan cabai diawasi dengan ketat guna mencegah kelangkaan dan lonjakan harga yang merugikan masyarakat;

3. Keterlibatan semua pihak sangat diperlukan untuk menciptakan kestabilan harga yang berkelanjutan. Ini adalah bagian dari upaya kita menjaga daya beli dan kesejahteraan masyarakat.